

## **BAGIAN II**

# **TEORI DAN KONSEP SEBAGAI *BACKGROUND KNOWLEDGE***

Dalam penelitian dengan paradigma kualitatif, teori dan konsep sebagai latar belakang pengetahuan (*background knowledge*), teori dan konsep tidak digunakan sebagai suatu landasan karena akan membatasi lingkup penelitian serta menyebabkan apriori tertentu dan menjauhkan dari fenomena alamiah yang ada di lapangan (Nasution, 1996). Selain sebagai *background knowledge*, beberapa teori atau konsep digunakan sebagai alat dialog dengan temuan penelitian dalam Bab VIII.

### **A. Teori dan Konsep Kearifan Lokal Kaitannya dengan Arsitektur dan Kota**

Istilah *genius loci* (kearifan lokal) dicetuskan oleh Christian Norberg Schulz dalam bukunya yang berjudul: *Genius Loci, Towards a Fenomenology of Architecture*. Menurut Schulz (1984), kota akan lebih tepat bila dipandang sebagai suatu loka (*loci, place, tempat*). Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kota tersebut menyediakan ruang (*space*) untuk kegiatan, untuk orientasi, disamping mempunyai karakter sebagai jiwa tempat, untuk identifikasi. Selanjutnya menurut Schulz, karakter yang spesifik dapat membentuk suatu identitas, yang merupakan suatu pengenalan bentuk dan kualitas ruang sebuah daerah perkotaan, yang secara umum disebut *a sense of place*. Pemahaman tentang nilai dari tempat ini merupakan pemahaman tentang *keunikan* dan *kekhasan* dari suatu tempat secara khusus, bila dibandingkan dengan tempat lain.

Sementara itu, Rosi (dalam Budihardjo, 1991) dalam bukunya: *The Architecture of The City* mengatakan bahwa keunikan atau karaktersitik tempat (*locus solus*) merupakan pembeda secara signifikan dengan tempat lainnya. Konsep *locus solus* dicetuskan oleh Rosi seorang arsitek dari Italia, pelopor gerakan *la Tendenza*, sebagai bentuk protes terhadap mewabahnya pengaruh gerakan arsitektur modern yang melanda seluruh dunia. Dengan sangat kritis dikecamnya kaidah-kaidah perancangan kota modern yang berlandaskan fungsionalisme sempit dan formalisme hampa. Semua itu mengakibatkan terciptanya kota-kota bertampang seragam, tunggal rupa, tanpa identitas yang jelas. Kecamannya bukan semata-mata

ditujukan pada sterilisasi bentuk atau modern yang serba dogmatis, tetapi lebih kepada kealpaan dan ketidak acuan para pengelola kota serta penghancuran karya arsitektur dan kawasan kota tertentu yang memiliki keunikan dan karakter spesifik. Padahal arsitektur atau lingkungan semacam itu mengemban misi sebagai sumber kenangan (*collective memory*) masa lampau, yang merupakan koleksi mosaik sejarah kehidupan manusianya. Menurut Budiharjo (1991) pada hakekatnya, kota tidaklah mewujud sekadar sebagai wadah aktifitas manusia masa kini saja, melainkan juga sebagai sumber kenangan masa lampau dan arena berfantasi ke masa depan. Dengan demikian dengan banyaknya bangunan kuno yang dihancurkan, ikut lenyap pulalah kenangan (*memory*) yang bisa merupakan bahan acuan untuk inspirasi bagi perancangan karya baru yang berkualitas. Menurut Rosi, tanda-tanda, simbol, peringatan, tengeran dan semacamnya, yang serba otentik, betapapun kecilnya akan sangat berarti sebagai cerminan sejarah kota dalam bentuk yang teraga dan kasat mata.

Menurut Siregar (2000), tiap kota yang ada sekarang, sebagai lingkungan binaan, telah melalui perkembangan sejarahnya masing-masing, yang membuatnya menjadi suatu tempat (*place*) dan ruang (*space*). Perkembangan itulah yang menentukan karakter atau identitasnya, yang merefleksikan berjalannya kehidupan, yaitu budaya dan tradisi, dengan lingkungan fisik-spasial. Walaupun budaya-budaya di Indonesia mungkin tidak terlampau tua, akarnya – terutama budaya jawa – merujuk jauh ke belakang. Budaya-budaya Indonesia, dan perwujudannya pada lingkungan fisik, telah melalui proses perkembangan, mengalami perubahan dan penyesuaian karena kontak dengan – bahkan “invasi” dari – budaya dan kekuatan besar lain. Untuk konteks Indonesia, identitas itu agaknya bukan dalam pengertian sesuatu yang *mono-characteristic* seperti banyak dikemukakan bahkan diidamkan, yang bagaimana pun menyarankan suatu keadaan ideal yang tunggal, yang merefleksikan inkarnasi impian utopia. Identitas kota Indonesia yang kita yakini didasarkan pada realitas *urban* yang kontemporer, yang selalu mempertahankan kekhususan konteks waktu dan tempatnya, dan dengan demikian unik untuk setiap kota di Indonesia, dan di mana pun. Oleh karena itu tiap kota seyogyanya dipahami secara spesifik, bukan dengan generalisasi. Di sinilah kiranya arsitektur dapat mengambil peran pentingnya. Menurut Kostof (1991) mengemukakan pengertian yang sederhana: “*cities are places made up of buildings and people*”. Berdasarkan pengertian tersebut, tatanan fisik spasial lingkungan binaan (terutama kota) menjadi titik tolak masuknya pendekatan arsitektur ke dalam masalah perkotaan (*urban*) yang kompleks. Dari

arah pendekatan itu dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif, karena membicarakan lingkungan perkotaan berarti seyogyanya sekaligus membicarakan kegiatan yang dilakukan di tempat itu.

Kaitan konsep tentang kearifan lokal kaitannya dengan arsitektur dan kota pada esensinya adalah segala upaya bagaimana merancang arsitektur dan kota yang berbasis kepada tema identitas dan jatidiri dengan cara menuntut penggalian dan penemuan kembali secara intensif dan ekstensif tentang kekhasan, kekhususan keunikan dan karakter yang spesifik yang menjiwai suatu kota (termasuk produk arsitekturnya) tertentu yang membedakannya secara bermakna dengan kota lain. Kearifan lokal dalam tata cara hidup, perilaku, kebiasaan dan adat istiadat yang telah menciptakan jatidiri masyarakat setempat harus menjadi landasan utama dalam perencanaan dan perancangan, tidak boleh dikendalikan dengan instruksi dan doktrin secara paksa dan pukul rata (serba sama), karena dengan demikian jiwa dan semangat suatu tempat akan sirna.

Dalam arsitektur, sebuah bentuk (*form*) ketika dihuni oleh manusianya dan memberikan segala hal yang dibutuhkannya, maka bentuk tersebut dianggap memiliki jiwa dan semangat (*spirit*). Tetapi yang perlu dilestarikan dan dikembangkan sebetulnya justru bukan bentuk itu semata, tetapi jiwa dan semangat suatu tempat jauh lebih penting. Bentuk fisik bisa berubah bahkan mati, tetapi jiwa dan semangat harus diupayakan tetap hidup. Jiwa dan semangat itulah yang harus ditangkap untuk kemudian diejawantahkan kembali secara dinamis-kreatif-inovatif, dengan idiom atau ungkapan baru yang mewakili kekinian.

## **B. Teori dan Konsep Hubungan Perilaku dan Lingkungan**

### **1. Perilaku Manusia Sebagai suatu Pendekatan**

Pendekatan perilaku menekankan pada keterkaitan yang dialektik antara ruang dengan manusia dan masyarakat yang memanfaatkannya atau menghuni ruang tersebut. Pendekatan ini menekankan perlunya memahami perilaku manusia atau masyarakat yang berbeda-beda di setiap tempat dalam memanfaatkan ruang. Ruang dalam pendekatan ini dilihat mempunyai arti dan nilai yang plural dan berbeda, tergantung tingkat apresiasi dan kognisi individu-individu yang menggunakan ruang tersebut. Dengan kata lain, pendekatan ini melihat bahwa aspek-aspek norma, kultur, psikologi masyarakat yang berbeda akan menghasilkan konsep dan wujud ruang yang berbeda pula (Rapoport dalam Haryadi dan Setiawan, 1995).

Selanjutnya secara konseptual, pendekatan perilaku menekankan bahwa manusia merupakan makhluk berpikir yang mempunyai persepsi dan keputusan dalam interaksinya dengan lingkungan. Konsep ini dengan demikian meyakini bahwa interaksi manusia dan lingkungan tidak dapat diinterpretasikan secara sederhana dan mekanistik, melainkan kompleks dan cenderung dilihat sebagai sesuatu yang “probabilistik”. Didalam interaksi yang kompleks ini, pendekatan perilaku memperkenalkan apa yang disebut sebagai proses kognitif (*cognitive process*) yakni proses mental ketika orang mendapatkan, mengorganisasikan, dan menggunakan pengetahuannya untuk memberi “arti” dan “makna” terhadap ruang yang digunakannya (Bell, 2001).

Secara umum pendekatan perilaku mulai mendapatkan momentum yang menarik dan penting ketika beberapa disiplin ilmu, terutama psikologi, geografi, sosial, perancangan (arsitektur dan kota) secara kolektif bekerjasama dan saling berbagi pengetahuan untuk menguak misteri dan kompleksitas hubungan antara lingkungan dan perilaku. Kerjasama kolektif ini terutama ditujukan untuk memahami bagaimana aspek-aspek psikologi, kultur dan sosiologi berperan memediasi hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Dengan kata lain, studi arsitektur lingkungan dan perilaku kemudian berkembang menjadi bidang kajian yang interdisiplin, menggabungkan beberapa disiplin ilmu secara holistik dipakai untuk memahami interaksi manusia dengan lingkungannya. Pada saat ini juga disepakati bahwa orientasi kajian arsitektur lingkungan dan perilaku harus diarahkan pada upaya-upaya untuk memecahkan persoalan lingkungan yang semakin kompleks (Haryadi dan Setiawan, 1995).

## **2. Pendekatan Fenomenologi di dalam Studi Perilaku**

Sebagaimana telah sebagian disinggung di muka, studi perilaku berkembang dari disiplin ilmu psikologi, yang kemudian didukung pula oleh disiplin ilmu geografi dan sosiologi. Pada awalnya, pendekatan studi ketiga disiplin ini, sebagaimana bidang-bidang ilmu lain cenderung bersifat positivistik deterministik. Kemudian muncul pendekatan baru yang dikenal dengan nama fenomenologi, yang bertujuan untuk tetap menggambarkan dan menjelaskan kompleksitas hubungan antara perilaku dan lingkungan. Pendekatan fenomenologi menekankan pada perlunya pemahaman yang simpatik didasarkan atas penjelasan yang holistik. Pendekatan fenomenologi tidak menyarankan pemahaman suatu fenomena dilakukan secara parsial, dengan memecah-mecah kompleksitas fenomena menjadi hubungan antara beberapa variabel yang sederhana melainkan secara serentak dan menyeluruh. Seamon (1972) mengatakan bahwa untuk memahami

suatu fenomena dapat dilakukan dengan memahami bagian perbagian fenomena tersebut yang kemudian direkonstruksi menjadi satu pemahaman yang utuh dan menyeluruh. Dalam Tabel 2 terdapat perbedaan yang kontras antara pendekatan positivistik dan fenomenologi:

Tabel 2  
Perbedaan pendekatan positivistik dan fenomenologi dalam studi perilaku

VARIABEL	POSITIVISTIK	FENOMENOLOGI
Subjek	Perilaku	Perilaku, kesadaran mental
Tujuan Studi	<i>Nomothetic</i>	<i>Idiographic</i>
Metodologi Studi	Analisis Eksperimental	Deskriptif, Eksploratif
Tingkat Analisis/Studi	<i>Molecular</i> (parsial)	<i>Molar</i> (keseluruhan)

Sumber: Stokols dalam Haryadi dan Setiawan, 1995

Dalam lingkup hubungan arsitektur, lingkungan dan perilaku, pendekatan fenomenologi menggunakan metode penelitian studi kasus. Studi kasus adalah suatu metode penelitian yang membantu peneliti secara khusus dan mendetail memilih dan mengkaji suatu fenomena dalam suatu seting tertentu atau yang spesifik. Metode ini dipakai apabila peneliti bertujuan untuk dapat menjelaskan sesuatu secara detail ketika konteks seting yang dikaji secara lengkap dijelaskan. Metode ini merupakan suatu metode penelitian yang banyak digunakan dalam bidang arsitektur lingkungan dan perilaku, terutama karena kajian arsitektur lingkungan dan perilaku menekankan pentingnya suatu objek dan seting yang spesifik. Objek dan seting yang spesifik ini dapat beragam, mulai dari kasus studi tentang seseorang dalam kamar, suatu keluarga dalam seting rumah, atau suatu kelompok masyarakat dalam seting kota (Haryadi dan Setiawan, 1995).

### 3. Kognisi Lingkungan dalam Kajian Arsitektur Lingkungan dan Perilaku

Kognisi lingkungan (*environmental cognition*) adalah suatu proses memahami (*knowing, understanding*) dan memberi arti/makna (*meaning*) terhadap lingkungan. Dijelaskan oleh Rapoport (1982) bahwa konsep kognisi lingkungan dikembangkan oleh para ahli psikologi dan antropologi. Para psikolog terutama mengartikan kognisi lingkungan lebih sebagai proses mengetahui dan memahami

lingkungan oleh manusia. Sementara para antropolog lebih melihatnya sebagai suatu proses pemberian arti/makna terhadap suatu lingkungan. Berbeda dari pandangan pertama yang lebih melihat kognisi lingkungan ini secara pragmatis-fungsional, pandangan kedua ini mempunyai konsekuensi yang lebih kompleks, oleh karena di dalam proses ini dimensi kultural akan lebih berperan di dalam kognisi lingkungan. Selanjutnya dikatakan oleh Rapoport, kognisi lingkungan ditentukan oleh tiga faktor yakni: *organismic*, *environmental*, dan *cultural*. Ketiganya saling berinteraksi mempengaruhi proses kognisi seseorang. Dimungkinkan bahwa satu faktor lebih berperan daripada faktor lainnya, akan tetapi setiap faktor mesti terlibat dalam proses kognisi lingkungan ini. Di dalam proses kognisi ini, struktur dan rangkuman subjektif pengetahuan, pemahaman, dan pemaknaan terhadap lingkungan disebut sebagai *schemata*, diartikan sebagai kerangka dasar berupa rangkuman pengalaman terhadap lingkungan baik yang pernah dialami maupun yang sedang dialami.

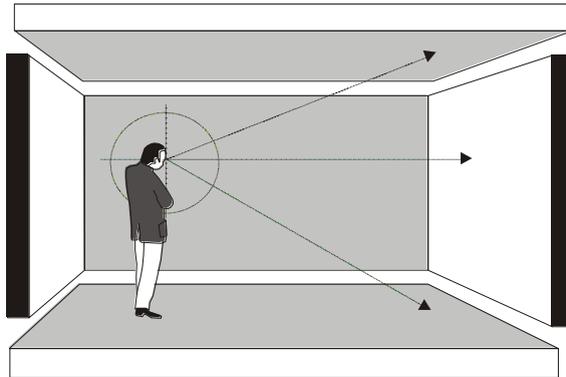
Kognisi lingkungan yang sifatnya abstrak ini dapat diproyeksikan secara spasial, dan di dalam kajian arsitektur lingkungan dan perilaku disebut sebagai peta mental. Peta mental atau sering pula disebut sebagai *cognitive maps*, dengan demikian didefinisikan sebagai gambaran spasial yang spesifik terhadap suatu lingkungan, dan berpengaruh terhadap pola perilaku seseorang. Oleh karena peta mental dipengaruhi oleh faktor-faktor *organismic*, *environmental*, dan kultural, maka setiap orang akan mempunyai peta mental yang berbeda terhadap suatu lingkungan yang sama. Hasil dari pengungkapan peta mental manusia akan menghasilkan citra kognitif lingkungan, yaitu berupa gambaran mental hasil proses kognisi dan ingatan atas dasar pengalaman tentang lingkungan kotanya, bersifat dinamis, mampu memadukan perilaku manusia sebagai pengamat, membantu menafsirkan informasi yang diperolehnya dari lingkungan sekitar.

## C. Teori dan Konsep *Urban Space*, *Place* dan *Urban Setting*

### 1. Definisi *Urban Space*

Menurut *The Oxford Dictionary and Thesaurus* (1997), pengertian *urban* adalah: kehidupan/situasi di perkotaan; sedangkan menurut Kamus Inggris - Indonesia (Echols dan Shadily, 1982) pengertian *urban* adalah: segala sesuatu yang berkaitan dengan perkotaan. Menurut Van de Ven (1991), terdapat perbedaan antara ruang/kamar (*room*) dengan ruang (*space*). Ruang/kamar (*room*) mencerminkan bidang batas yang lebih ketat dan konstruktif dan batas ruang disebut dengan dimensi ketiga. Ruang (*space*) dibatasi oleh

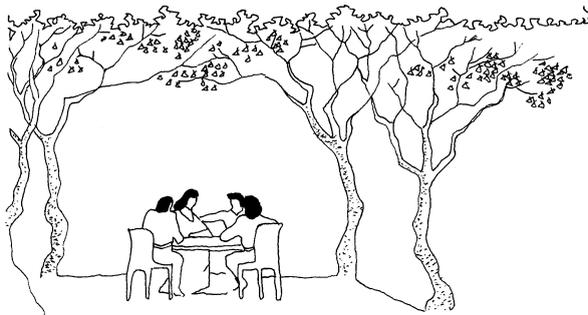
bidang batas berupa pelingkup yang tidak ketat bahkan lebih transendental.



Gambar 2

Ruang/kamar (*room*) dengan bidang batas vertikal yang merupakan dimensi ketiga

Sumber: Ching, 2000



Gambar 3

Ruang (*space*) dengan pepohonan sebagai *enclosure* (pelingkup)

Sumber: Ching, 2000

Di dalam *space* tidak disebut sama sekali mengenai pelingkup ruang (*spatial enclosure*) sebagai dimensi ketiga tempat orang-orang berdiri. *Spatialitas* hanyalah merupakan salah satu cara untuk menginterpretasikan materi. *Spatial form* (bentuk spasial) paling sederhana diekspresikan dengan “*keempat dinding*” yang melingkungi kita. Reduksi dari bentuk menjadi empat bidang elementer ini telah membayangkan konfigurasi abstrak. Bentuk spasial tidak secara otomatis mencakup atap, karena ruang tidak harus selalu beratap seperti misalnya pada halaman, taman, plaza atau ruang-ruang

perkotaan (Van de Ven, 1991). Untuk membedakan pengertian *room* dan *space* dijelaskan dalam Gambar 2 dan Gambar 3. Berdasarkan penjelasan gambar tersebut, dalam mendefinisikan “ruang perkotaan” maka kata “ruang” diterjemahkan sebagai *space*, sedangkan “perkotaan” diterjemahkan sebagai *urban*. Khusus untuk pengertian “perkotaan” (*urban*) dapat dijelaskan berdasarkan UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, tertulis dalam pasal 1 ayat 10, definisi kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Menurut Zahd (1999) mendefinisikan sebuah “kota” secara arsitektural jauh lebih mudah karena hanya menekankan aspek-aspek kota secara fisik dengan memperhatikan hubungan antara ruang dan massa perkotaan serta bentuk, polanya dan bagaimana semua hal itu dapat terwujud. Namun mendefinisikan “perkotaan” akan sangat kompleks, karena tidak hanya membicarakan dimensi-dimensi fisik, namun juga dimensi kehidupan sosial-budaya-ekonomi-politik yang berada di dalamnya.

Tabel 3  
Perbedaan Tipologi *Rural-Urban*

<b>KOTA TRADISIONAL (PRA-INDUSTRI) → RURAL</b>	<b>KOTA MODERN (INDUSTRI) → URBAN</b>
<b>RUANG/MORFOLOGI</b>	
Kota disusun dengan memusatkan bangunan-bangunan simbolis dan publik, serta tempat tertentu. Simbol: istana, gedung religi, benteng, dan lain-lain. Hubungan erat dengan lingkungan yang dekat. Wilayah-wilayah dibatasi secara jelas berdasarkan kelompok etnis	Kota disusun dengan memusatkan institusi (misalnya institusi perdagangan). Simbol CBD ( <i>Central Business District</i> ), pencakar langit, gedung pemerintah, dan lain-lain. Hubungan dengan lingkungan yang jauh lewat teknologi komunikasi dan lalu lintas.
<b>EKONOMI</b>	
Sistem tukar menukar atau sistem keuangan yang sederhana. Kekayaan berdasarkan kepemilikan tanah atau barang. Landasan pada teknologi pertanian lokal. Masyarakat cenderung berfokus pada penyediaan kebutuhan sendiri, sistem pertukangan.	Sistem perdagangan luas dan kompleks. Kekayaan dihitung dengan kapital. Landasan pada teknologi industri. Keterkaitan secara regional, nasional, dan internasional. Pembagian kerja berlangsung secara rumit dan spesifik.

<b>KOTA TRADISIONAL (PRA-INDUSTRI) → RURAL</b>	<b>KOTA MODERN (INDUSTRI) → URBAN</b>
<b>POLITIK</b>	
Orientasi tradisional. Tradisi-tradisi rohaniah. Ahli-ahli tertentu (misalnya tokoh religi) memiliki monopoli pengetahuan walaupun ada landasan pengetahuan yang disebarkan secara luas. Ancaman hukuman secara informal. Hukum bersifat represif. Kontrak secara informal. Kekuasaan pada elit religi/politik. Penting hubungannya dengan yang berkuasa. Latar belakang keluarga penting.	Otoritas legal/rasional. Tradisi-tradisi sekuler. Jarak pengetahuan jauh antara para ahli dan orang biasa. Kekuasaan dikelola oleh para kapitalis, teknokrat dan birokrat. Ancaman hukuman secara institusional. Hukum bersifat restitusi. Kontrak secara formal. Penghargaan lebih berdasarkan pada hasil usaha daripada hubungan dengan yang berkuasa. Latar belakang keluarga dipandang sekunder.
<b>SOSIO-BUDAYA</b>	
Penekanan pada hubungan dalam keluarga besar (saudara, tetangga, teman). Rasa kebersamaan. Komunikasi secara berhadapan muka. Kohesi etnis. Budaya homogen. Kepercayaan ritual. Status diberikan.	Penekanan pada individu sebagai unit. Peranan terpisah-pisah. Mobilitas sosial (hubungan secara fungsional). Komunikasi massal. Budaya heterogen. Keterasingan. Status dicapai oleh diri sendiri.

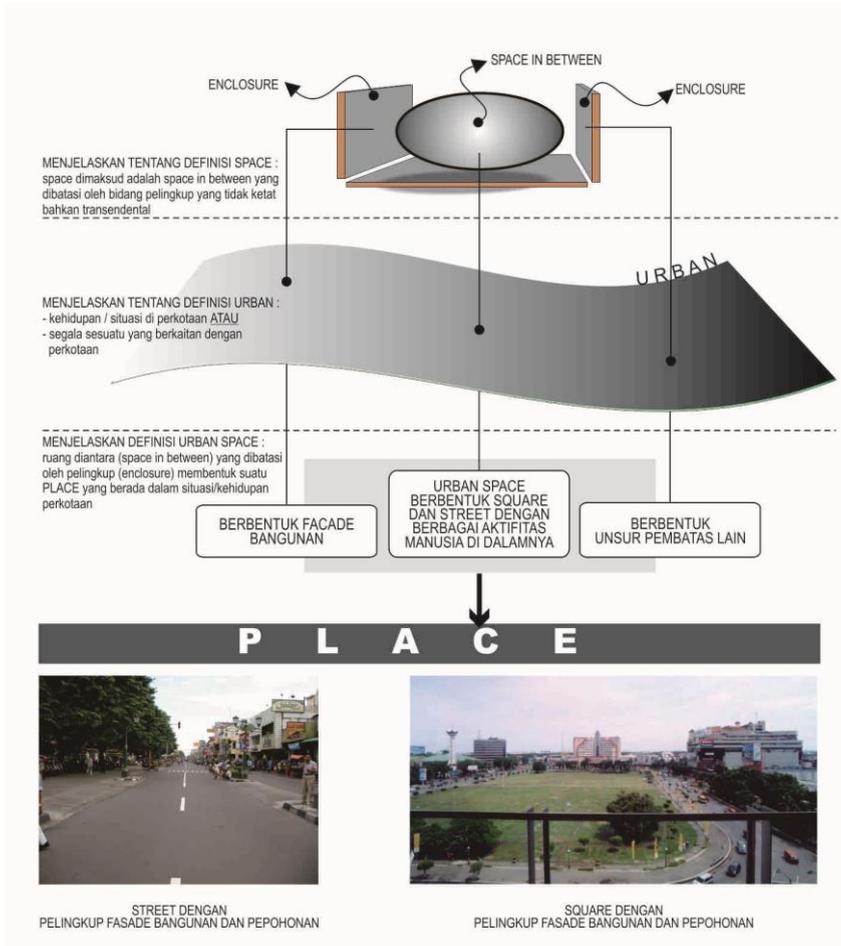
Sumber: Philips, E.Barbara dkk. (*City Lights, An Introduction to Urban Studies*) dalam Zahd, 1999.

Selanjutnya menurut Zahd, definisi ”perkotaan” harus dilihat secara komprehensif dengan melihat berbagai macam aspek di dalamnya. Pemahaman definisi ”perkotaan”, dijelaskan melalui perbedaan antara kota tradisional (pra-industri) yang bersifat *rural* dengan kota modern (industri) yang bersifat *urban*.

Perbedaan definisi yang dijelaskan dalam tabel tersebut mengisyaratkan adanya dikotomi yang sangat jelas, namun dalam memahami pengertian “perkotaan” terutama untuk kota-kota di Indonesia memerlukan penyesuaian-penyesuaian secara khusus. Misalnya kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, meskipun termasuk dalam kategori *urban*, namun dalam kenyataannya masih diwarnai berbagai kehidupan masyarakat yang bersifat *rural*, misalnya beberapa kota masih terdapat kampung-kampung. Oleh karena itu definisi “perkotaan” untuk kota-kota besar

di Indonesia tidak dapat begitu saja dilihat dalam konteks dikotomi antara *rural* dan *urban*, namun memerlukan penyesuaian-penyesuaian bahkan penggabungan diantaranya.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka *urban space* dapat di definisikan sebagai: “ruang diantara (*space in between*) yang dibatasi oleh pelingkup (*enclosure*) membentuk suatu *place* yang berada dalam situasi/kehidupan perkotaan” (Purwanto, 2004c) (diperjelas melalui Gambar 4).



Gambar 4  
Diagram Untuk Menjelaskan Pengertian *Urban Space*  
Sumber: Purwanto, 2004c

Pengertian *urban space* menurut Spreiregen (1969), merupakan pusat kegiatan formal suatu kota, dibentuk oleh *façade* bangunan (*sebagai enclosure*) dan lantai kota. Ruang perkotaan dibedakan oleh karakteristik yang menonjol, seperti kualitas yang melingkupinya, kualitas pengelolaan detail, kualitas fungsi, dan aktivitas yang berlangsung didalamnya. Menurut Lynch (dalam Budihardjo, 1991) karakteristik yang menonjol merujuk kepada konteks identitas sebuah kota. Arti dari identitas itu sendiri secara gamblang diungkapkan oleh Lynch: “tidak dalam arti persamaannya dengan yang lain, tetapi justru mengacu kepada makna individualitasnya yang mencerminkan perbedaannya dengan objek lain serta pengenalannya sebagai entitas yang tersendiri”. Selain itu, menurut Rosi (1982), karakteristik kota yang menonjol merujuk pula kepada karakter spesifik sebuah lingkungan arsitektur atau lingkungan yang mengemban misi sebagai sumber kenangan (*collective memory*) masa lampau, yang merupakan koleksi mosaik sejarah kehidupan manusianya.

Pada hakekatnya, kota tidaklah mewujudkan sekadar sebagai wadah aktifitas manusia masa kini saja, melainkan juga sebagai sumber kenangan masa lampau dan arena berfantasi ke masa depan. Menurut Rosi, tanda-tanda, simbol, peringatan, tengeran dan semacamnya, yang serba otentik, betapapun kecilnya akan sangat berarti sebagai cerminan sejarah kota dalam bentuk yang teraga dan kasat mata dan hal itulah yang membedakannya dengan kota-kota yang lainnya.

## **2. *Urban Space sebagai Place***

Menurut Schulz (1979), sebuah *place* adalah sebuah *space* yang memiliki suatu ciri khas tersendiri, sedangkan menurut Trancik (1986) sebuah *space* akan ada kalau dibatasi sebagai sebuah *void* dan sebuah *space* menjadi sebuah *place* kalau mempunyai arti dari lingkungan yang berasal dari budaya lokalnya. Pandangan Schulz berangkat dari asumsi bahwa sebuah ruang tidak bersifat kosong/steril, namun mempunyai aktifitas kehidupan di dalamnya yang dibangun sebagai proses interaksi oleh manusia penggunaannya. Asumsi Schulz memberikan penekanan bahwa ruang (*space*) akan mudah dikonstruksi jika ruang tersebut sejak awal sudah memberikan makna (sebagai *place*). Sebaliknya Trancik mempunyai pandangan berbeda bahwa sebuah ruang (*space*) akan lebih mudah dipahami apabila terlebih dahulu mengalami konstruksi (bentuk), kemudian menyusul maknanya (sebagai *place*). Dalam melihat sebuah ruang perkotaan, Schulz lebih berfokus pada prosesnya (melalui interaksi manusia dan kegiatannya

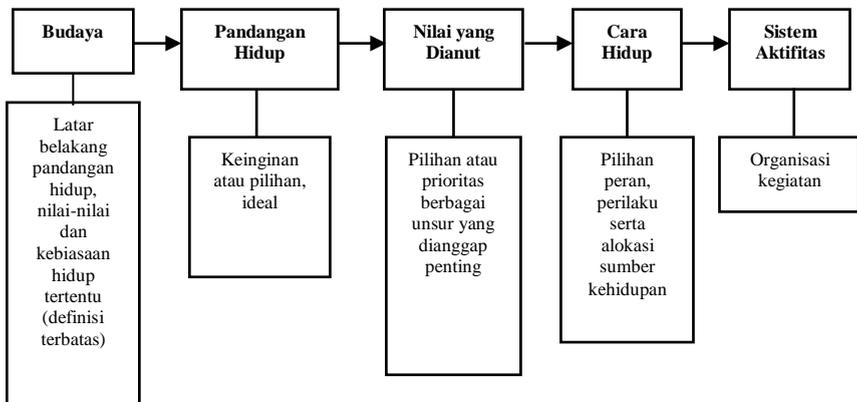
dalam sebuah wadah), sedangkan Trancik lebih berfokus pada produknya (wadahnya). Pandangan Trancik yang deterministik-positivistik tentang ruang kosong dan netral dalam ruang perkotaan (misalnya konsep mengenai *lost space*) menjadi konsep yang tidak relevan lagi dipakai sebagai konsep untuk memahami realitas empiris ruang-ruang perkotaan. Oleh karena itu konsep tentang tempat (*place*) dan ruang (*space*) ketika digunakan dalam memahami fenomena ruang perkotaan ini lebih tepat apabila dilihat sebagai proses pembentukannya. Artinya, dalam memahami sebuah ruang perkotaan harus memperhatikan aspek-aspek fundamental, yaitu arti ruang perkotaan serta morfologinya beserta aspek kehidupan dan kegiatan manusia di dalamnya, dengan memakai suatu pendekatan yang bersifat terpadu (integral). Pendapat Schulz didukung oleh Madanipour (1996), ia berpendapat bahwa dalam memahami tempat (*place*) dan ruang (*space*) perlu mencakup dua aspek yang saling berkait yaitu: [i] kumpulan berbagai bangunan dan artefak (*a collection of building and artifacts*) dan [ii] tempat untuk berhubungan sosial (*a site for social relationships*). Kedua aspek tersebut sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan. Madanipour menambahkan bahwa dalam memahami sebuah ruang perkotaan, tidak hanya membicarakan dimensi fisik, namun juga dimensi sosial, dan simbolisnya secara terus menerus.

### **3. *Urban Space sebagai Urban Setting***

Pengertian seting, menurut Moore (dalam Snyder, 1992), didefinisikan sebagai tempat (pelataran) yang mempunyai dimensi skala mikro (bagian-bagian dari ruang dalam bangunan); meso (tempat dengan skala kawasan/kota); dan makro (skala wilayah regional, nasional sampai dengan dunia). Dalam konteks informasi perilaku lingkungan yang diusulkan oleh psikolog Irwin Altman, dirumuskan sebuah model yang memuat tiga komponen pokok: [i] fenomena perilaku lingkungan; [ii] kelompok-kelompok pemakai dan; [iii] seting (pelataran). Di dalam model tersebut dijelaskan bahwa hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan fisiknya yang berupa seting (pelataran) akan melahirkan konsep-konsep perilaku fenomena.

Pada dasarnya, hubungan lingkungan dengan perilaku manusia menekankan bahwa latar belakang manusia seperti pandangan hidup, kepercayaan yang dianut, nilai-nilai dan norma-norma yang dipegang akan menentukan perilaku seseorang yang antara lain tercermin dalam cara hidup dan peran yang dipilihnya di masyarakat. Lebih lanjut, konteks kultural dan sosial ini akan menentukan sistem aktivitas atau kegiatan manusia (Rapoport, 1977). Cara hidup dan sistem kegiatan

akan menentukan macam dan wadah bagi kegiatan tersebut. Wadah tersebut adalah ruang-ruang yang saling berhubungan dalam satu sistem tata ruang dan berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan tadi. Kerangka pendekatan ruang dari aspek perilaku menekankan pada faktor *human agency* yakni keputusan setiap individu manusia atau sekelompok manusia untuk merumuskan pandangan-pandangannya terhadap dunia, merumuskan nilai-nilai kehidupan yang diyakini bersama, menjabarkannya dalam kebiasaan hidup sehari-hari yang tertuang dalam sistem kegiatan dan wadah ruangnya (*setting sistem*). Dengan kata lain, motif-motif aktivitas manusia tidak sekadar dapat dipahami secara mekanistik sebagai respon terhadap stimuli-stimuli ekonomis atau biologis saja, melainkan mengandung makna dan simbol yang telah disepakati antar kelompok-kelompok manusia tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa aspek psikologi manusia dan kultur suatu masyarakat akan menentukan bentuk aktivitas dan wadahnya (lihat Gambar 5).



Gambar 5  
 Hubungan Antara Budaya, Perilaku, Sistem Aktivitas dan Sistem Seting

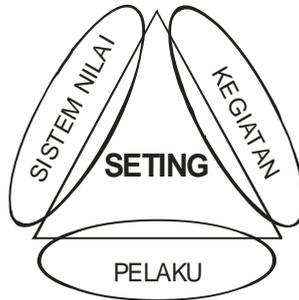
Sumber: Rapoport, 1977

Karena definisi ruang biasanya lebih bersifat spasial saja, sementara kenyataannya ruang tersebut terintegrasi secara erat dengan sekelompok manusia dengan segala kegiatannya dalam kurun waktu tertentu, maka dalam hubungan lingkungan dan perilaku manusia, istilah seting cenderung lebih banyak digunakan. Istilah seting lebih memberikan penekanan pada unsur kegiatan manusia yang tidak nampak jelas pada istilah ruang. Lebih lanjut, di dalam hubungan lingkungan dan perilaku manusia, dipergunakan juga istilah sistem

karena hal ini akan lebih memberikan penekanan tentang adanya keterikatan masing-masing seting yang satu dengan lainnya yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri namun saling berkaitan.

Berdasarkan Gambar 5 tersebut diatas, kegiatan didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang pada jarak waktu tertentu. Kegiatan tersebut selalu mengandung empat hal pokok: [i] pelaku, [ii] macam kegiatan, [iii] tempat dan [iv] waktu berlangsungnya kegiatan. Secara konseptual, sebuah kegiatan dapat terdiri dari sub-sub kegiatan yang saling berhubungan sehingga terbentuk sistem kegiatan (Rapoport, 1977).

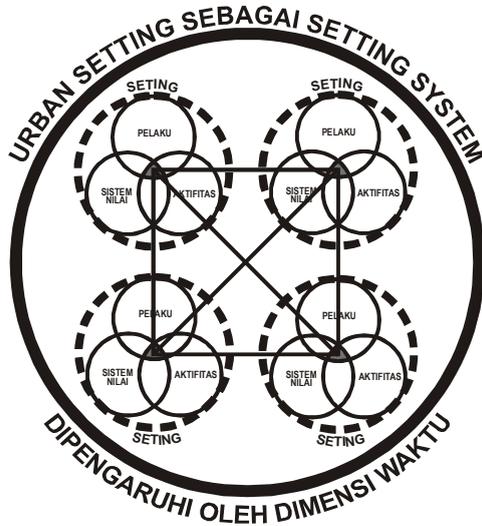
Menurut Purwanto (2004c), seting adalah lingkungan yang mengandung tiga unsur: manusia sebagai pelaku, kegiatan dan sistem nilai. Berdasarkan pengertian tersebut maka seting tidak dapat dipahami secara utuh tanpa keterkaitan ketiga unsur-unsur tersebut (Gambar 6).



Gambar 6

Keterkaitan Pelaku, Kegiatan dan Sistem Nilai dalam Seting  
Sumber: Purwanto, 2004c

*Urban Setting* didefinisikan sebagai lingkungan tempat manusia tinggal dan melakukan kegiatannya dengan latar belakang aktifitas perkotaan (Purwanto, 2004c). Berdasarkan definisi tersebut terdapat keterkaitan antara hubungan manusia dengan lingkungan (berupa ruang perkotaan) sebagai tempat manusia tersebut beraktifitas sebagai settingnya. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *urban space* merupakan *urban setting* yang didalamnya merupakan sistem seting yang terbentuk dalam konteks ruang perkotaan sebagai suatu organisasi dari seting-seting yang ada ke dalam suatu sistem yang mengandung unsur-unsur: [i] manusia sebagai pelaku, [ii] macam kegiatan yang terjadi, [iii] sistem nilai/budaya yang tercipta. Ketiga unsur tersebut dipengaruhi oleh dimensi waktu berlangsungnya kegiatan (Gambar 7).



Gambar 7  
*Urban Setting sebagai Setting System*  
 Sumber: Purwanto, 2004c

#### D. Teori dan Konsep Memaknai Objek

##### 1. Non Verbal

Menurut Budiarto (2004), bidang non verbal adalah suatu wilayah yang menekankan pentingnya fenomena yang bersifat empiris, faktual atau konkrit, tanpa ujaran-ujaran bahasa. Ini berarti bahwa bidang non verbal berkaitan dengan benda konkrit, nyata dan dapat dibuktikan dengan melalui indera manusia. Dalam sebuah kegiatan pemaknaan, sebenarnya telah terjadi keterhubungan antara seseorang (pengamat atau disebut subjek) dengan objek yang diteliti/diamatinya. Keterhubungan antara subjek dan objek memiliki keterarahan atau intensionalitas yang tertuju pada objek itu sendiri dan dari objek tersebut akan "memperlihatkan" (menampilkan) gejala-gejala yang pada akhirnya akan ditangkap oleh si subjek. Menurut Heidegger (dalam Budiarto, 2004), manusia berada dalam "dunia" – "dunia yang penuh dengan tanda non verbal" dan menyatu dalam kehidupannya disebutnya sebagai *in der Welt sein* (ada di dalam dunia). Bagi Heidegger, dunia adalah dunia penuh tanda-tanda yang sekaligus dihayati oleh manusia sebagai bagian dari pengalaman hidupnya. Heidegger memberi contoh, ketika seseorang bekerja di sebuah kantor, maka kantor itu merupakan "dunia" yang penuh makna, karena ia menggantungkan seluruh kehidupannya pada kantor tersebut, tidak semata bangunan/gedungnya saja tetapi substansi kantor itu mengisi

kehidupannya (bekerja, mendapat gaji, peningkatan jenjang karier, kepuasan batin).

Menurut Rapoport (1982), pemaknaan juga dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur non verbal dari suatu budaya seperti pakaian, perletakan, bentuk dan susunan ruang dalam rumah, jenis makanan serta gerak tubuh. Unsur-unsur tersebut mempunyai makna tertentu dan berpengaruh terhadap perilaku seseorang atau sekelompok orang. Manusia dapat saling berkomunikasi satu sama lain melalui unsur-unsur tersebut.

Di dalam komunikasi non verbal, seting dapat dilihat berdasarkan dua unsur, yaitu [i] unsur manifes dan [ii] unsur simbolik atau laten. Dalam kelompok manusia yang berbeda-beda, unsur simbolik atau laten inilah yang biasanya membedakan warna dari suatu kegiatan tertentu yang antara lain terlihat pada penggunaan wadah atau seting yang berbeda-beda untuk kegiatan tersebut. Hakekat studi arsitektur lingkungan dan perilaku sebenarnya untuk memahami aspek manifes serta laten suatu kejadian atau fenomena (Rapoport, dalam Haryadi dan Setiawan, 1995).

## 2. Simbolik

Pemaknaan dapat juga dipelajari melalui pendekatan simbolik. Simbol adalah unsur khusus suatu lingkungan binaan yang dapat diinterpretasi artinya melalui latar belakang budaya manusia. Ada dua macam simbol yang banyak dibicarakan yaitu [i] simbol yang maknanya dapat dimengerti bersama oleh masyarakat dan [ii] simbol yang hanya bersifat khusus (*idiosinkratis*), terbatas penggunaannya oleh seseorang atau kelompok tertentu (Rapoport, 1982). Simbol mengkomunikasikan hubungan serta posisi seseorang dalam hubungan tersebut. Dengan membaca simbol-simbol tersebut, manusia dapat mengetahui perilaku yang diharapkan di suatu tempat tertentu sehingga dapat dihindari hal-hal yang tidak sesuai. Menurut Herusatoto (2003), simbol ialah sesuatu hal atau keadaan yang merupakan media pemahaman terhadap objek. Untuk mempertegas pengertian simbol ini, lebih dahulu dibedakan pengertian isyarat, tanda dan simbol dalam Tabel 4. Untuk mengetahui perbedaan secara jelas antara isyarat, tanda dan lambang, di berikan contoh-contoh isyarat, tanda dan lambang atau simbol sebagai berikut:

*Pertama*, isyarat dapat berupa gerak tubuh atau anggota badan, suara-suara atau bunyi-bunyian, sinar dan asap. Sementara itu, isyarat-isyarat *morse* bisa berupa kibaran bendera yang dipakai pramuka atau anggota angkatan laut, gerak tubuh polisi lalu lintas,

bunyi telegraf, suara peluit pramuka dan polisi, kepulan asap orang Indian, juga termasuk kategori isyarat.

*Kedua*, tanda-tanda dapat berupa benda-benda, seperti tugu-tugu jarak jalan, tanda-tanda lalu lintas, tanda pangkat dan jabatan, tanda-tanda baca dan tanda tangan. Tanda-tanda yang merupakan keadaan, misal munculnya awan pada siang hari (tanda akan turun hujan), adanya asap tanda ada api, munculnya kilat tanda akan guntur.

*Ketiga*, lambang atau simbol dapat berupa lambang partai, palang merah, salib, bulan bintang, simbol matematika dan logika, badan atau organisasi seperti PBB, departemen, sekolah, universitas, institut, dan lain-lain. Seloka, pepatah, candara sengkala, kisah dan dongeng, pun bisa menjadi lambang yang tidak berbentuk benda.

Tabel 4  
Perbedaan antara isyarat, tanda dan lambang/symbol

No.	Isyarat	Tanda	Lambang/Symbol
1	Diberitahukan oleh subjek kepada objek (subjek aktif)	Subjek diberitahu oleh objek (subjek pasif)	Subjek dituntun memahami objek (subjek aktif)
2	Mempunyai satu arti	Hanya memuat dua arti	Mempunyai lebih banyak arti
3	Diberitahukan oleh subjek kepada objek secara langsung (berlaku satu kali)	Subjek diberitahu objek terus menerus (berlaku secara tetap)	Subjek dituntun memahami objek secara terus menerus (berlaku secara tetap)
4	Abstrak	Bentuknya bisa konkrit, bisa abstrak	Berbentuk konkrit/abstrak
5	Dikenal, Diketahui oleh manusia dan binatang secara langsung	Dikenal, diketahui oleh manusia dan binatang setelah diajarkan berulang-ulang	Hanya manusia yang memahaminya
6	Yang dipakai untuk isyarat tidak ada hubungan khusus dengan yang diisyaratkan	Yang dipakai untuk tanda selalu punya hubungan khusus dengan yang ditandai	Yang dipakai untuk lambang/ simbol tidak mempunyai hubungan khusus dengan yang dilambangkan
7	Diciptakan oleh manusia untuk manusia dan binatang	Diciptakan manusia dan binatang untuk manusia dan binatang	Diciptakan manusia untuk manusia

Sumber: Herusatoto, 2003

Simbolisme terbentuk sebagai perkembangan lebih lanjut dan termasuk dalam kegiatan bahasa manusia. Dengan sendirinya segala pengertian yang terkandung dalam simbolisme tak ubahnya seperti dalam bahasa pula, yaitu terbentuk berdasarkan kesepakatan sekelompok masyarakat. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan pengertian dan pemakaian sesuatu simbol baik dalam religi maupun tradisi pada beberapa kelompok masyarakat dan suku.

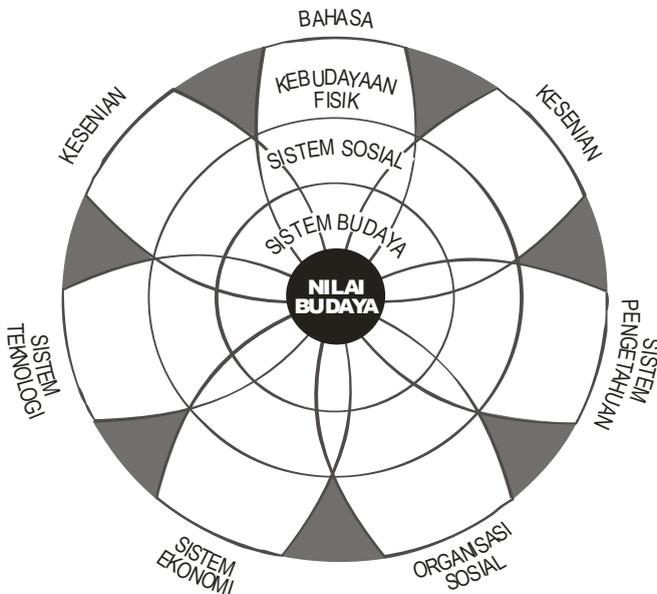
Menurut Budiarto (2004), simbol tidak hanya sekadar tanda saja, tetapi menjadi sistem simbol yang penuh dengan transformasi untuk menemukan kreativitas dan bahkan dapat menjadi simbol yang lebih komunikatif. Manusia dapat menjadi arif dalam menghubungkan simbol-simbol dengan apa yang menjadi keinginannya dan ia menjadi semakin pandai dalam memahaminya pula. Selanjutnya menurut Budiarto, tanda dan simbol sangat berbeda karena keduanya dianggap berada pada dua bidang pembahasan yang berbeda. Tanda adalah bagian dari dunia fisik, sedang simbol adalah bagian dari dunia makna manusia. Tanda adalah sebagai “operator” yang bila dipahami dan dipergunakan tetap merupakan sesuatu yang fisik dan substansial, sedang simbol adalah “designator” yang hanya memiliki nilai fungsioanal yaitu intelegensi simbolis dan imajinasi simbolis. Ricoeur (dalam Budiarto, 2004) merumuskan simbol sebagai semacam struktur yang signifikan yang mengacu pada sesuatu secara langsung dan mendasar dengan makna literal dan ditambahkan dengan makna yang lain, yaitu makna yang mendalam makna kedua (*secondary meaning*) dan figuratif dan itu hanya akan terjadi apabila menembus makna yang pertama. Oleh karena itu ekspresi simbol selalu bermakna ganda. Selanjutnya Ricoeur mengatakan bahwa ada korelasi antara interpretasi dengan simbol. Interpretasi adalah cara berfikir yang teratur dalam menemukan makna yang tersembunyi pada makna-makna yang muncul dalam “lipatan” taraf yang berada pada makna literal. Antara simbol dan interpretasi dapat menjadi konsep yang korelatif sifatnya, akan ada interpretasi yang mempunyai makna banyak (*multiple meaning*).

#### **E. Lingkungan Fisik dan Pola Aktifitas Manusia sebagai Perwujudan Nilai-nilai dan Sistem Budaya**

Menurut Rapoport (1977), sebuah seting merupakan produk hubungan timbal balik antara aktifitas manusia dengan lingkungan fisik yang sangat dipengaruhi oleh sistem nilai/budaya. Menurut Rapoport pada dasarnya, hubungan lingkungan dengan perilaku

manusia menekankan bahwa latar belakang manusia seperti pandangan hidup, kepercayaan yang dianut, nilai-nilai dan norma-norma yang dipegang akan menentukan perilaku seseorang yang antara lain tercermin dalam cara hidup dan peran yang dipilihnya di masyarakat. Konteks kultural dan sosial ini akan menentukan sistem aktifitas atau kegiatan manusia. Cara hidup dan sistem kegiatan akan menentukan macam dan wadah bagi kegiatan tersebut. Wadah tersebut adalah ruang-ruang yang saling berhubungan dalam satu sistem tata ruang dan berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan.

Menurut Koentjaraningrat (2003), ketika lingkungan fisik dan aktifitas manusia terlibat interaksi, keduanya merupakan bagian dari wujud budaya. Koentjaraningrat membagi kebudayaan sesuai dengan empat wujudnya yang secara simbolis digambarkan sebagai empat lingkaran konsentris (lihat Gambar 8).



Gambar 8  
 Kerangka Kebudayaan  
 Sumber: Koentjaraningrat, 2003

Lingkaran yang paling luar, dan karena itu letaknya pada bagian paling luar melambangkan kebudayaan sebagai [1] *artifacts* atau benda-benda fisik; [2] lingkaran berikutnya (dan tentunya lebih kecil) melambangkan kebudayaan sebagai sistem tingkah laku dan tindakan berpola; [3] lingkaran yang berikutnya lagi (dan lebih kecil daripada kedua lingkaran yang berada di sebelah “luar” nya

melambangkan kebudayaan sebagai sistem gagasan; dan [4] lingkaran hitam yang letaknya paling dalam dan bentuknya juga paling kecil, dan merupakan pusat atau inti melambangkan kebudayaan sebagai sistem gagasan yang ideologis.

Contoh dari wujud konkrit kebudayaan yang digambarkan sebagai lingkaran pertama, adalah antara lain bangunan-bangunan gedung, candi, kemudian benda-benda bergerak seperti kapal, pesawat terbang, mobil dan benda-benda lainnya. Semua benda hasil karya manusia tersebut bersifat konkrit dan dapat diraba menggunakan indera manusia, dapat difoto. Sebutan khusus bagi kebudayaan dalam wujud konkrit ini adalah "kebudayaan fisik". Lingkaran kedua menggambarkan wujud tingkah laku manusianya, yaitu misalnya tingkah laku dalam melakukan suatu pekerjaan, dan lain-lain. Kebudayaan dalam wujud ini masih bersifat konkrit dan dapat diraba menggunakan indera manusia, dapat difoto. Semua gerak gerik yang dilakukan dari saat ke saat dan dari ke hari, dari masa ke masa, merupakan pola-pola tingkah laku yang dilakukan berdasarkan sistem. Karena itu pola-pola tingkah laku manusia disebut dengan "sistem sosial". Lingkaran ketiga menggambarkan wujud gagasan dari kebudayaan, dan tempatnya adalah dalam kepala tiap individu warga kebudayaan yang bersangkutan, yang dibawanya ke manapun ia pergi. Kebudayaan dalam wujud ini bersifat abstrak, tidak dapat difoto, dan hanya dapat diketahui serta dipahami (oleh warga kebudayaan lain) setelah ia mempelajarinya dengan mendalam, baik melalui wawancara yang intensif atau dengan membaca. Kebudayaan dalam wujud gagasan juga berpola dan mendasarkan sistem-sistem tertentu yang disebut "sistem budaya". Lingkaran keempat, yang pada gambar diberi warna hitam, adalah gagasan-gagasan yang telah dipelajari oleh para warga suatu kebudayaan sejak usia dini, dan karena itu sangat sukar dirubah. Istilah untuk menyebut unsur-unsur kebudayaan yang merupakan pusat dari semua unsur yang lain adalah "nilai-nilai budaya", yang menentukan sifat dan corak dari pikiran, cara berfikir, serta tingkah laku manusia suatu kebudayaan. Gagasan-gagasan inilah yang akhirnya menghasilkan berbagai benda yang diciptakan manusia berdasarkan nilai-nilai, pikiran dan tingkah lakunya.

Selanjutnya menurut Koentjaraningrat, sistem nilai-nilai budaya adalah tingkat tertinggi dan paling abstrak dari adat istiadat. Sebabnya adalah karena nilai budaya terdiri dari konsep-konsep mengenai segala sesuatu yang dinilai berharga dan penting oleh warga suatu masyarakat, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman orientasi pada kehidupan warga masyarakat yang bersangkutan. Nilai-nilai budaya ini biasanya sulit diterangkan secara rasional dan nyata,

namun justru karena itulah ia berada dalam daerah emosional dan telah berakar dalam alam jiwa seseorang. Karena itu untuk mengganti suatu nilai budaya yang telah dimiliki dengan budaya lain diperlukan waktu yang lama. Dalam setiap masyarakat, baik yang kompleks maupun yang sederhana, ada sejumlah nilai budaya yang saling berkaitan dan bahkan telah merupakan suatu sistem. Sebagai pedoman dari konsep-konsep ideal, sistem itu menjadi pendorong yang kuat untuk mengarahkan kehidupan masyarakat.

Menurut Maran (2000), terdapat perbedaan antara nilai-nilai dan kepercayaan. Kepercayaan menjelaskan apa itu sesuatu, sedangkan nilai menjelaskan apa yang seharusnya terjadi. Menurut Maran, nilai itu luas, abstrak, standar kebenaran yang harus dimiliki, yang diinginkan, dan yang layak dihormati. Nilai akan menentukan suasana kehidupan kebudayaan dan masyarakat. Nilai mengacu pada apa atau sesuatu yang oleh manusia dan masyarakat dipandang sebagai yang paling berharga. Dengan perkataan lain, nilai itu berasal dari pandangan hidup suatu masyarakat. Pandangan hidup itu berasal dari sikap manusia terhadap Tuhan, terhadap alam semesta, dan terhadap sesamanya. Sikap ini dibentuk melalui pelbagai pengalaman yang menandai sejarah kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Kepercayaan berkaitan dengan pandangan tentang bagaimana dunia ini beroperasi. Kepercayaan itu bisa berupa pandangan-pandangan atau interpretasi-interpretasi tentang masa lampau, bisa berupa penjelasan-penjelasan tentang masa lampau, bisa berupa penjelasan-penjelasan tentang masa sekarang, bisa berupa prediksi tentang masa depan, dan bisa juga berdasarkan *common sense*, akal sehat, kebijaksanaan yang dimiliki suatu bangsa, agama, ilmu pengetahuan, atau suatu kombinasi antara semua hal tersebut di atas.

Hal sama dikemukakan oleh Bertrand (1967), terdapat perbedaan antara nilai dan keyakinan/kepercayaan. Menurut Bertrand, nilai sering dikacaukan dengan keyakinan atau kepercayaan. Keyakinan dapat berisi kepercayaan-kepercayaan bahwa suatu argumentasi sungguh-sungguh dianggap benar. Keyakinan tidak memerlukan bukti empiris. Keyakinan adalah pikiran-pikiran tentang hal-hal yang dipandang sebagai faktor-faktor, dan orang-orang yang mengetahuinya tak akan berani menentanginya. Pengertian keyakinan dapat digambarkan dengan kecenderungan terhadap apa-apa yang disukai dan apa-apa yang tidak disukai.

Secara khusus nilai menurut Soelaeman (2005) adalah sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai subjek, menyangkut segala sesuatu yang baik atau yang buruk sebagai abstraksi, pandangan, atau maksud dari berbagai pengalaman dengan seleksi perilaku yang ketat. Hal

tersebut diperkuat oleh Williams (dalam Soelaeman, 2005) bahwa terdapat empat kualitas tentang nilai-nilai yaitu:

- (a) Nilai-nilai mempunyai sebuah elemen konsepsi yang lebih mendalam dibandingkan dengan hanya sekadar sensasi, emosi, atau kebutuhan. Dalam hal ini nilai dianggap sebagai abstraksi yang ditarik dari pengalaman-pengalaman seseorang.
- (b) Nilai-nilai menyangkut atau penuh dengan semacam pengertian yang memiliki suatu aspek emosional. Emosi di sini mungkin diungkapkan sebenarnya atau merupakan potensi.
- (c) Nilai-nilai bukan merupakan tujuan konkret dari tindakan, tetapi mempunyai hubungan dengan tujuan, sebab nilai-nilai berfungsi sebagai kriteria dalam memiliki tujuan-tujuan. Seseorang akan berusaha mencapai segala sesuatu yang menurut pandangannya mempunyai nilai-nilai.
- (d) Nilai-nilai merupakan unsur penting, dan tidak dapat disepelekan bagi orang yang bersangkutan. Dalam kenyataan, nilai-nilai berhubungan dengan pilihan, dan pilihan merupakan prasyarat untuk mengambil suatu tindakan.

## **F. Teori dan Konsep Kampung Kota**

### **1. Karakteristik dan Permasalahan Fisik Kampung Kota**

Menurut Setiawan (2006), sejarah membuktikan bahwa peradaban umat manusia tumbuh di perkotaan. Dalam hal ini, masa depan umat manusia akan sangat tergantung di kota. Oleh karena itu kita harus kritis, karena pada saat sekarang kota banyak menghadapi persoalan yang sangat luar biasa, tidak hanya fisik, namun juga persoalan lingkungan. Urbanisasi dan perkembangan kota semakin dilihat dan diyakini sebagai sesuatu yang tidak terelakkan dan tak terbendung. Selanjutnya menurut Setiawan, terdapat faktor utama yang berpengaruh terhadap perkembangan kota-kota di Indonesia saat ini, yaitu masalah utama dan mendasar adalah proses perkembangan kota yang cenderung dikontrol oleh pasar dan kapital, apabila hal ini terus terjadi, dikhawatirkan kota-kota akan semakin kehilangan keunikannya, tidak punya jatidiri dan bahkan kurang/tidak berbudaya.

Munculnya bisnis-bisnis kapitalis sebagai konsekuensi dari modernisasi dan proses rasionalisasi, yang diidentikkan dengan perkembangan kota, justru mengarah kepada birokrasi dan administrasi total. Tepatnya, semua itu untuk kepentingan berputar dan beranak pinaknya modal. Legalitas dan formalitas yang diwujudkan dalam hukum dan tata kota merupakan alat dan sarannya. Peristiwa pengusuran dan merebaknya perkampungan miskin dan liar

merupakan harga kemanusiaan yang harus dibayar atasnya. Kota dibekukan oleh perputaran modal dan atas nama aspek legal-formal. Padahal dunia kehidupan perkotaan, sebagai wilayah serba mungkin yang menuntut keputusan kehendak itu – ideanya – harus tetap terbuka, justru untuk mengarahkan administrasi birokratis itu (Yoshi, 2005).

Selama ini kota modern di Jawa mengandung dan melahirkan kampung. Kampung menjadi ciri tata kota kolonial untuk menjadikan kota ada. Ia menjadi pembeda dan pemberi kerangka pada kota modern yang ideal. Demikian pula akhirnya kampung menjadi “komunitas” orang per-orang yang menyesuaikan diri dengan situasi perkotaan yang kian hari kian banyak orang yang datang untuk bekerja sama dan bersaing (Murray; Evers dalam Yoshi, 2005). Sejak tahun 1960an, semua kampung di kota adalah bentuk lain dari desa yang mengalami kepadatan penduduk berlebihan dan muncul mata pencaharian di luar sektor pertanian. Di desa-desa itulah terjadi proses kampungisasi, sebagai tempat terdapat konflik tinggi, banyak acara dan aktifitas kerja yang berbeda-beda, maka disebut kampung, yang selanjutnya disebut rukun kampung. Jadi, secara umum lahirnya kampung-kampung di Jawa bukan sebagai bagian dari kota yang mempunyai spesialisasi kerja tertentu. Selain itu, pada umumnya kampung-kampung terbentuk tanpa ada desain kota sebagai sebuah sistem yang dirancang dengan pemikiran komprehensif. Di tingkat abstraksi, kampung selalu menjadi bayang-bayang perencana dan penguasa kota ketika mulai berfikir tentang kota. Kampung menjadi representasi keliraran kota, yang bisa berarti kekumuhan, kemiskinan, dan kesemrawutan. Akibatnya pola usir dan gusur atas nama hukum akan selalu menjadi senjata konkritnya. Di sisi lain kampung terus bergerak, kampung dalam segala kekurangannya merupakan model nyata kota kita yang pernah ada namun terus berubah. Menurut Yoshi, dapat dikatakan bahwa kota merupakan abstraksi, kampung adalah realitasnya. Bicara kota tidak mungkin mengelak melihat realitas kampung, demikian pula bergelut dengan kampung tidak mungkin lepas dari cekaman kota.

Menurut Kusno (2000), kehidupan di dalam kampung kota mencerminkan masalah utama rakyat banyak dan juga merupakan kenyataan arsitektur dan ruang kota. Mulai dari masa akhir penjajahan, kampung adalah suatu obyek yang sarat politik. Manipulasi kawasan kampung tidak hanya terbatas pada cara memperbaiki dan mengangkat kehidupan penduduknya sebagai titipan politik penjajah maupun Republik. Kadangkala kampung, atas nama kekumuhan, kemiskinan, dan kesemrawutannya, disembunyikan atau disingkirkan, agar kota dan bangsa yang “ideal” muncul ke permukaan.

Sejak awal, kampung selalu menjadi unsur pembentuk utama kota. Tidak hanya secara fisik kampung mendominasi wujud kota, secara fungsional selama ini kampung menjadi ruang kehidupan bagi sebagian warga kota. Kampung merupakan sejarah dan bagian-bagian dari kota-kota kita, yang juga menjadi urat nadi dan jantung kota, karena sebagian besar tenaga kerja dan kegiatan ekonomi kota didukung oleh kampung dan warganya (Setiawan, 2006).

## **2. Karakteristik Perilaku Sosial-Budaya Masyarakat Kampung Kota**

Karakteristik perilaku sosial-budaya masyarakat kampung sangat ditentukan komunitas warganya. Menurut Koentjaraningrat (2002), konsep komunitas mempunyai ciri kebudayaan atau cara hidup yang berbeda dari kelompok lain. Sebuah komunitas besar terbentuk berdasarkan komunitas-komunitas kecil yang terdapat di daerah pedesaan dan perkotaan. Selanjutnya menurut Koentjaraningrat, bahwa dalam masyarakat komunitas kecil sering nampak suatu rasa saling tolong menolong yang besar atau dalam istilah lain disebut sebagai gotong royong untuk menyebut saling membantu. Dalam masyarakat yang berjiwa gotong royong, kebutuhan umum akan dinilai lebih tinggi daripada kebutuhan individu.

Karakteristik perilaku sosial-budaya masyarakat kampung adalah kebersamaan penduduk atau warganya (Khudori, 2002). Diakui oleh Khudori, bahwa ada perubahan sosial di kampung-kampung, terutama di kota-kota besar. Penduduk kampung tidak lagi homogen, baik dari segi agama, suku bangsa, aliran politik, mata pencaharian, maupun tingkat pendidikan. Keterikatan terhadap kampung dan kehidupan pertetanggaannya, bagi sebagian penduduk, juga berkurang, akibat tuntutan jalan hidup modern yang lebih rasional, profesional, dan individualistis. Namun ada dua kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, dan tidak atau belum akan berubah dalam jangka waktu lama. Yakni, pertama, bahwa kampung merupakan satu-satunya jenis permukiman yang bisa menampung golongan penduduk yang tingkat perekonomiannya dan pendidikannya paling rendah (meskipun tidak tertutup kemungkinan bagi penduduk berpenghasilan dan berpendidikan tinggi). Kedua, dalam setiap kampung selalu ada organisasi sosial (bentukan pemerintah atau warga kampung sendiri) yang mengatur dan mengawasi tata tertib kehidupan kemasyarakatan warga kampung yang bersangkutan. Artinya, kampung masih (dan mungkin akan tetap) merupakan satuan teritorial dan sosial terkecil dalam sistem administrasi dan kemasyarakatan di Indonesia.

Kenyataan ini memang merupakan pisau bermata dua. Di satu pihak organisasi kampung bisa digunakan oleh negara untuk menancapkan hegemoninya. Di pihak lain, organisasi yang sama bisa pula digunakan oleh warganya untuk memperjuangkan kepentingannya. Salah satu contoh pada jaman Orde Baru, melalui politik pembangunan dan ideologi keamanannya, wilayah administrasi kota ditentukan dan dibagi-bagi dalam batas yang jelas (misalnya melalui kebijakan mengganti Rukun Kampung/RK menjadi Rukun Warga/RW dan Rukun Tetangga/RT) dengan tujuan untuk mempermudah kontrol masyarakat sebagai bentuk penjelmaan dari kebijakan “politik masa mengambang” rezim orde baru.

Melalui contoh kehidupan kampung-kampung yang terletak di kota Yogyakarta, Prawoto (2005) memberikan gambaran tentang lorong kampung melalui aktifitas dan tanda-tanda melalui sekuen untuk menunjukkan lumer dan mangkirnya batas antara yang privat dan yang publik. Lorong kampung terbentuk dalam sejarah interaksi yang panjang yang dibangun oleh warga kampung. Lorong kampung lahir dari kenyataan hidup sehari-hari yang bersifat privat bagi orang-orang yang tinggal di sekitarnya, dalam menata ruang hidup tempat tinggalnya, ditengah-tengah hidup pertetanggaan. Lorong kampung lahir atas nama kepentingan yang bersifat personal, namun dalam kenyatannya sangat memperhatikan kepentingan hidup bersama. Lorong kampung menjadi manifestasi proses negosiasi antar personal, antar pihak, antar kepentingan, yang terus menerus berlangsung seiring dengan perubahan perilaku warganya. Lorong kampung mengandung sejarah panjang komunitas bawah kampung-kampung perkotaan, yang penuh dengan konflik, aturan nilai, sikap, pedoman, dan dasar-dasar hidup pertetanggaan yang tidak pernah tertulis. Khudori (2002) memberikan gambaran kehidupan kampung-kampung di kota Yogyakarta merupakan lahan subur bagi pertumbuhan dan pengembangan kebudayaan. Di sinilah para cendekiawan, budayawan, seniman, pemimpin masyarakat, tokoh-tokoh agama baik yang bertaraf lokal, nasional, maupun internasional dilahirkan dan ditempa. Kampung-kampung di kota Yogyakarta juga merupakan taman-taman indah bagi mekarnya kepedulian akan sesama. Di sinilah si kaya dan si miskin hidup berdampingan, pejabat dan orang kebanyakan saling bertegur sapa, yang “makan sekolahan” dan yang kurang terpelajar saling belajar. Dari kampung-kampung ini pula, seperti tercatat dalam sejarah, bermula gerakan-gerakan pembaharuan masyarakat, seperti yang terjadi pada masa kebangkitan nasional.

## **G. Teori dan Konsep Konflik Ruang dan Manajemen Pengelolaannya**

### **1. Konflik, Negosiasi dan Konsensus dalam Perspektif Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*)**

Konflik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam jaring-jaring kehidupan manusia (Budiharjo, 1993). Konflik dapat terlihat jika terjadi pertentangan, tapi tidak selamanya konflik dapat menjadi suatu pertentangan, adapula konflik yang terjadi dapat dirasakan tapi tidak berkembang menjadi kenyataan.

Menurut Hendrics (1992), konflik dapat dikelompokkan menjadi tiga tahap, dari yang paling sederhana sampai dengan yang rumit. Konflik pada tahap awal tidak begitu terlihat, tidak menimbulkan perselisihan bahkan kalau dibiarkan akan hilang dengan sendirinya. Konflik pada tahap kedua sudah dapat dirasakan, dikenali karena sudah ada pemenang, ada pihak yang dominan dan ingin menguasai pihak lain. Konflik pada tahap ketiga, pihak yang dominan sudah mempunyai keinginan untuk menguasai seluruh daerah kekuasaannya bahkan melenyapkan saingannya. Menurut Kartika (2000), kondisi konflik yang terjadi dapat diidentifikasi dalam situasi seperti berikut: [i] tanpa konflik, dalam kesan umum adalah lebih baik, namun bila setiap kelompok yang hidup damai ingin agar keadaan ini terus berlangsung, maka mereka harus hidup bersemangat, dinamis, pandai mengelola konflik; [ii] konflik laten, sifatnya tersembunyi, perlu diangkat kepermukaan sehingga dapat ditangani secara efektif; [iii] konflik dipermukaan, tidak memiliki akar atau hanya memiliki akar yang dangkal saja, muncul karena hanya karena kesalahpahaman yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi; [iv] konflik terbuka, adalah yang berakar dalam dan sangat nyata, memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya.

Untuk mencari jalan keluar sebuah konflik, diperlukan upaya negosiasi dua belah pihak. Pada dasarnya negosiasi adalah cara bagaimana kita mengenali, mengelola dan mengendalikan emosi kita dan emosi pihak lain. Di sinilah seringkali banyak di antara kita tidak menyadari bahwa negosiasi sebenarnya lebih banyak melibatkan apa yang ada di dalam hati atau jiwa seseorang. Ini seperti gambaran sebuah gunung es, di mana puncak yang kelihatan merupakan hal-hal yang formal. Namun yang sering dilupakan dalam proses negosiasi adalah hal-hal yang tidak kelihatan, seperti misalnya hasrat, keinginan, perasaan, nilai-nilai maupun keyakinan yang dianut oleh individual yang terlibat dalam konflik atau yang terlibat dalam proses negosiasi.

Hal-hal yang di dalam inilah justru seringkali menjadi kunci terciptanya negosiasi yang sukses dan efektif.

Dalam buku *Teach Yourself Negotiating*, karangan Phil Baguley (dalam Prijosaksono dan Sembel, 2004), dijelaskan tentang definisi negosiasi yaitu suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Negosiasi memiliki sejumlah karakteristik utama, yaitu: [i] senantiasa melibatkan orang – baik sebagai individual, perwakilan organisasi atau perusahaan, sendiri atau dalam kelompok; [ii] memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi mulai dari awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi; [iii] menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu –baik berupa tawar menawar (*bargain*) maupun tukar menukar (*barter*); [iv] hampir selalu berbentuk tatap-muka –yang menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh maupun ekspresi wajah; [v] negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi dan kita inginkan terjadi; [vi] ujung dari negosiasi adalah adanya kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak, meskipun kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat.

Berdasarkan uraian di atas, nampak dengan jelas bahwa konflik dapat diatasi dengan menggunakan negosiasi dan negosiasi merupakan bagian proses menuju sebuah konsensus. Dalam pandangan teori sosiologi, menurut Dahrendorf (dalam Maliki, 2004) masyarakat mempunyai dua wajah yaitu konflik dan konsensus. Ia mengakui masyarakat tidak dapat bertahan tanpa konflik dan konsensus, yang keduanya menjadi prasyarat. Jadi, kita tidak dapat menemukan konflik jika sebelumnya tidak ada konsensus, sebaliknya konflik dapat mengarahkan konsensus dan integrasi.

Di dalam sebuah konsensus terjadi sebuah pertukaran, ada yang memberi dan ada yang menerima sehingga kedua belah pihak berada dalam satu kesetimbangan. Dalam perspektif teori pertukaran sosial (*social exchange theory*), kita masuk ke dalam hubungan pertukaran dengan orang lain karena dari padanya kita memperoleh imbalan. Dengan kata lain hubungan pertukaran dengan orang lain akan menghasilkan suatu imbalan bagi kita, disitulah sebuah konsensus terjadi. Dalam teori pertukaran sosial terlihat antara perilaku dengan lingkungan terdapat hubungan yang saling mempengaruhi (*reciprocal*). Karena lingkungan kita umumnya terdiri atas orang-orang lain, maka kita dan orang-orang lain tersebut dipandang mempunyai perilaku yang saling mempengaruhi. Dalam hubungan tersebut terdapat unsur imbalan (*reward*), pengorbanan (*cost*) dan keuntungan (*profit*). Imbalan

merupakan segala hal yang diperoleh melalui adanya pengorbanan, pengorbanan merupakan semua hal yang dihindarkan, dan keuntungan adalah imbalan dikurangi oleh pengorbanan. Jadi perilaku sosial terdiri atas pertukaran paling sedikit antar dua orang berdasarkan perhitungan untung-rugi. Misalnya, pola-pola perilaku di tempat kerja, percintaan, perkawinan, persahabatan - hanya akan langgeng manakala kalau semua pihak yang terlibat merasa teruntungkan. Jadi perilaku seseorang dimunculkan karena berdasarkan perhitungannya, akan menguntungkan bagi dirinya, demikian pula sebaliknya jika merugikan maka perilaku tersebut tidak ditampilkan. Berdasarkan keyakinan tersebut Homans (dalam Wiggins, 1994) mengeluarkan beberapa proposisi dan salah satunya berbunyi: "Semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang, makin sering satu bentuk tindakan tertentu memperoleh *imbalan*, makin cenderung orang tersebut menampilkan tindakan tertentu tadi". Proposisi ini secara eksplisit menjelaskan bahwa satu tindakan tertentu akan berulang dilakukan jika ada imbalannya. Proposisi lain yang juga memperkuat proposisi tersebut berbunyi: "Makin tinggi nilai hasil suatu perbuatan bagi seseorang, makin besar pula kemungkinan perbuatan tersebut diulangnya kembali". Bagi Homans, prinsip dasar pertukaran sosial adalah "*distributive justice*" - aturan yang mengatakan bahwa sebuah imbalan harus sebanding dengan investasi. Proposisi yang terkenal sehubungan dengan prinsip tersebut berbunyi "seseorang dalam hubungan pertukaran dengan orang lain akan mengharapkan imbalan yang diterima oleh setiap pihak sebanding dengan pengorbanan yang telah dikeluarkannya - makin tinggi pengorbanan, makin tinggi imbalannya - dan keuntungan yang diterima oleh setiap pihak harus sebanding dengan investasinya - makin tinggi investasi, makin tinggi keuntungan".

Sosiolog Amerika Peter Blau (dalam Wiggins, 1994) mengembangkan teori pertukaran yang lebih komprehensif, yaitu analisis pertukaran antar individu dalam organisasi yang kompleks; cara pertukaran di tingkat mikro sebagaimana yang diterangkan oleh Homans dalam kemunculan organisasi sosial yang besar di tingkat makro. Pertukaran-pertukaran di tingkat individu ini memunculkan institusi sosial, dan cara untuk mengamati pertukaran sosial di tingkat mikro adalah dengan menggunakan pendekatan-pendekatan psikologis individu seperti dukungan sosial, dan sebagainya. Ia banyak berbicara tentang cara pertukaran yang tak seimbang menimbulkan dominasi sosial, strategi dalam pertukaran sosial, dan cara sebuah struktur kekuasaan menjadi stabil dan seimbang.

## 2. Pemicu Terjadinya Konflik Ruang

Pada dasarnya konflik adalah hal yang wajar, normal, dan tidak bisa dihindari ketika beberapa atau kelompok orang-orang saling berinteraksi bersama (Lingren, 1996). Konflik adalah perselisihan alami yang disebabkan oleh individu atau kelompok yang mempunyai perbedaan kebutuhan, persepsi (cara pandang), perasaan, emosi, tingkah laku, nilai, kepercayaan, atau kekuatan (Hobban, 2004). Konflik-konflik yang muncul dalam memanfaatkan dan mengelola ruang secara umum terjadi jika (Ikaputra, 2004):

(a) **Ketika seseorang atau sebuah kelompok mengacuhkan kebutuhan pihak lain.**

Kelompok arsitek perencana dan perancang adakalanya melupakan prinsip-prinsip bahwa ruang (terutama ruang publik) adalah untuk semua lapisan masyarakat. Namun terdapat kecenderungan bahwa beberapa kelompok masyarakat tidak terakomodasi kebutuhannya, akibatnya beberapa tempat menjadi tidak bersahabat terutama untuk anak-anak, orang miskin, dan orang-orang yang mempunyai keterbatasan fisik (cacat).

(b) **Ketika orang menginterpretasikan kenyataan dengan cara yang berbeda.**

Orang bisa mempunyai persepsi yang berbeda dalam melihat masalah perkotaan. Salah satu contoh adalah pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di jalur pedestrian (trotoar), di satu sisi trotoar adalah tempat pejalan kaki. PKL menganggap bahwa trotoar merupakan tempat umum (*public places*), dan pejalan kaki merasa haknya berjalan dirampas oleh PKL. Keadaan menjadi lebih parah ketika pemerintah setempat tidak mempunyai kekuatan penegakan hukum dan aturan.

(c) **Ketika orang mengacuhkan perasaan dan emosi mereka atau orang lain.**

Sebagai contoh, grafiti sebagai sarana dan media pengekspresian jiwa muda bisa membuat orang lain senang ataupun kesal. Orang akan senang dalam berpartisipasi mengerjakan lukisan dinding yang akan membuat lingkungan mereka terlihat lebih unik dan cantik. Sebaliknya, mereka akan kesal saat mereka menemukan pagar dan tembok mereka dicat secara liar.

- (d) **Ketika satu kelompok menolak untuk menerima kenyataan bahwa kelompok lain mempunyai sesuatu yang bernilai.**

Konflik demikian terjadi jika sekelompok orang melihat bangunan bersejarah mempunyai nilai, namun kelompok lain menganggap bangunan sejarah adalah "benda" yang patut dibongkar karena tidak lagi mempunyai nilai ekonomis. Konflik dalam konservasi dari kawasan lama timbul saat sebuah kelompok bersikeras untuk menjaga nilai historis area tersebut tanpa memahami kebutuhan pengguna yang sekarang dan generasi yang akan datang. Kenapa kita ingin melestarikannya? Apakah karena aspek ini merupakan bagian dari warisan kita? Untuk meningkatkan lingkungan berpenghuni? Untuk mendapatkan uang melalui turisme? Dilain pihak, investor membongkar beberapa gedung tua demi untuk modernisasi dengan mempertimbangkan nilai tanah dan ketidak efisienan dari pemanfaatan gedung tua.

- (e) **Ketika seseorang menggunakan kekuatan sebagai pengaruh penting dalam merubah pendirian orang lain.**

Kekurang efektifan kepemimpinan atau pembuat keputusan atau kurang sepakatan tentang "siapa yang memegang kendali" atau "bagaimana kita akan menyelesaikan masalah yang ada" dalam segala situasi dapat menjadi sumber konflik (Lingern, 1996). Dalam krisis kepemimpinan ini, penggunaan tempat umum dapat saja didominasi oleh individu atau kelompok dan menyingkirkan individu/kelompok lain yang juga mempunyai hak untuk menggunakannya. Sementara itu, pihak yang berwajib dari pemerintah terkadang mencurigai hal-hal yang negatif, curiga dan menutup diri terhadap aktivitas komunitas pada tempat umum. Pemerintah sering menunjukkan kekuatannya untuk mengendalikan tempat umum dengan membangun pagar di sekitarnya sehingga orang tidak mempunyai kebebasan untuk menggunakan tempat tersebut.

### 3. **Mengelola konflik Ruang**

Konflik tidak selalu negatif, perselisihan, perbedaan atau nilai konflik seperti yang terjadi bisa di indikasikan karena situasi yang tidak terelakkan dalam hubungan manusia (Lingern dalam Ikaputra, 2004). Pada kenyataannya, konflik bisa menjadi hal yang baik jika dikendalikan secara efektif. Konflik yang sehat bisa menyebabkan perkembangan dan inovasi, menuju metode pemikiran yang baru, dan

ke pengaturan tambahan pilihan. Jika suatu konflik dipahami, ini bisa diatur secara efektif dengan pencapaian konsensus yang memenuhi baik persyaratan kebutuhan individu maupun sosial. Ini menghasilkan keuntungan mutual dan menguatkan hubungan (Hoban dalam Ikaputra, 2004).

Menurut Lingern, terdapat lima strategi luas yang biasa digunakan orang-orang dalam menghadapi perselisihan dan konflik: [i] kekuatan, [ii] kompromi, [iii] menghindari penarikan mundur, [iv] hasil yang damai, dan [v] sinergi. Hampir sama dengan Lingern, Hoban mengkategorisasikan strategi manajemen konflik ke dalam: [i] kolaborasi, [ii] kompromisasi, [iii] kompetisi, [iv] akomodasi, dan [v] penghindaran. Dalam beberapa kasus perlu untuk mempunyai fasilitator netral untuk membantu menggerakkan kelompok/individu yang terlibat dalam konflik untuk mencapai konsensus. Berdasarkan strategi Lingern dan Hoban (dalam Ikaputra, 2004) serta Prijosaksono dan Sembel (2002), bisa digambar diagram sebagai berikut:

		Saya, satu, sebuah kelompok	
		Menang	Kalah
Anda, orang lain, kelompok	Menang	Sinergi Kolaborasi Kompromisasi	Akomodatif
	Kalah	Menggunakan Kekuatan	Penghindaran Keputusan

Gambar 9  
Diagram Strategi untuk Mengelola Konflik Ruang  
Sumber: Modifikasi dari Ikaputra (2004)

- (a) **Kuadran kolaborasi dan kompromi**  
 “Saya menang, anda menang”, adalah pendekatan sinergis yang menyertai tujuan kedua belah pihak kelompok yang terlibat dalam konflik. Keduanya secara antusias bekerjasama untuk mencapai kesepakatan. Kompromisasi adalah: “saya menang (sedikit), anda menang (sedikit), adalah resolusi negosiasi sebagai jalan mencapai solusi yang bisa lebih ditoleransi oleh tiap kelompok. Karena pengguna daerah

umum mempunyai macam-macam aktivitas, tujuan, dan tingkah laku, mereka harus mentoleransi animo untuk kelompok lainnya, dan berusaha menunjukkan “kebaikan umum”. Kuadran ini disebut dengan gaya manajemen konflik kolaborasi atau bekerja sama. Tujuannya adalah mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui konsensus atau kesepakatan bersama yang mengikat semua pihak yang bertikai. Proses ini biasanya yang paling lama memakan waktu karena harus dapat mengakomodasi kedua kepentingan yang biasanya berada di kedua ujung ekstrim satu sama lainnya. Proses ini memerlukan komitmen yang besar dari kedua pihak untuk menyelesaikannya dan dapat menumbuhkan hubungan jangka panjang yang kokoh. Secara sederhana, proses ini dapat dijelaskan bahwa masing-masing pihak memahami dengan sepenuhnya keinginan atau tuntutan pihak lainnya dan berusaha dengan penuh komitmen untuk mencari titik temu kedua kepentingan tersebut.

**(b) Kuadran pendekatan akomodatif**

Dengan membuat situasi pada “saya kalah, anda menang” adalah jalan yang efektif dalam perlindungan diri dan melindungi hubungan individu/kelompok dengan pihak lainnya. Strategi mengalah ini umumnya digunakan pada saat akibatnya lebih penting bagi pihak yang lainnya, atau salah satu pihak mencoba untuk menghindari konflik terhadap kepentingan pihak lainnya. Strategi "saya menang, anda kalah" dihasilkan dari tingkat kepedulian yang tinggi terhadap kepentingan kelompok itu sendiri dengan tidak mengindahkan kepentingan kelompok lainnya. Strategi ini melibatkan resolusi melalui penggunaan kekuasaan dan menang dengan kekuatan atau paksaan. Hal ini umumnya digunakan jika hak dasar terancam. Mengalah dalam hal ini bukan berarti kalah, tetapi menciptakan suasana untuk memungkinkan penyelesaian yang paripurna terhadap konflik yang timbul antara kedua pihak. Mengalah memiliki esensi kebesaran jiwa dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk juga mau mengakomodasi kepentingan kita sehingga selanjutnya secara bersama bisa menuju ke kuadran pertama.

**(c) Kuadran pendekatan untuk mencapai strategi keputusan**

"Saya kalah, anda kalah" menunjukkan usaha untuk melindungi kelompok dalam konflik dari keterlibatan dalam pergulatan yang tidak ada akhirnya yang tidak bisa

dimenangkan. pendekatan penghindaran ini digunakan saat konfrontasi berpotensi memiliki kekalahan yang tinggi. Kuadran ini menjelaskan cara mengatasi konflik dengan menghindari konflik dan mengabaikan masalah yang timbul. Atau bisa berarti bahwa kedua belah pihak tidak sepakat untuk menyelesaikan konflik atau menemukan kesepakatan untuk mengatasi konflik tersebut. Kita tidak memaksakan keinginan kita dan sebaliknya tidak terlalu menginginkan sesuatu yang dimiliki atau dikuasai pihak lain. Cara ini sebetulnya hanya bisa kita lakukan untuk potensi konflik yang ringan dan tidak terlalu penting. Jadi agar tidak menjadi beban dalam pikiran atau kehidupan kita, sebaiknya memang setiap potensi konflik harus dapat segera diselesaikan.

**(d) Kuadran pendekatan persaingan (dengan kekuatan)**

"Saya menang, anda kalah" menunjukkan usaha untuk melakukan persaingan. Kuadran ini memastikan bahwa kita memenangkan konflik dan pihak lain kalah. Biasanya kita menggunakan kekuasaan atau pengaruh kita untuk memastikan bahwa dalam konflik tersebut kita yang keluar sebagai pemenangnya. Biasanya pihak yang kalah akan lebih mempersiapkan diri dalam pertemuan berikutnya, sehingga terjadilah suatu suasana persaingan atau kompetisi di antara kedua pihak. Gaya penyelesaian konflik seperti ini sangat tidak mengenyahkan bagi pihak yang merasa terpaksa harus berada dalam posisi kalah, sehingga sebaiknya hanya digunakan dalam keadaan terpaksa yang membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tegas.

Menurut Ikaputra (2004), perlu dibuat langkah-langkah untuk mengatur konflik. Kita harus mulai menganalisa konflik dengan memahami perbedaan kebutuhan, nilai, persepsi dari kelompok yang terlibat yang menyebabkan konflik dalam menggunakan atau membuat tempat umum yang terbuka dan bisa di akses. Kemudian, kita menentukan strategi pengaturan dengan mengembangkan secara hati-hati pendekatan sinergis, kompromisasi, tindakan akomodatif, menggunakan pendekatan kekuatan atau membiarkan konflik tak terselesaikan. Saat mengembangkan kriteria dalam memilih atau menggabungkan kemungkinan alternatif, kita harus meninjau kembali kepentingan konflik. Juga harus dipertimbangkan prinsip-prinsip seperti keadilan, efisiensi, dan kebaikan ilmiah. Pendekatan yang dipilih harus dibicarakan ke semua kelompok yang terlibat konflik.

Kartika (2000) menjabarkan berbagai pendekatan untuk mengelola konflik agar tercapai tujuan dengan baik, yaitu: [i] pencegahan konflik, bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras; [ii] penyelesaian konflik, bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan perdamaian; [iii] pengelolaan konflik, bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat; [iv] resolusi konflik, menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan; [v] transformasi konflik, mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari pertikaian menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.